****

BUPATI PARIGI MOUTONG

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang   :   a. bahwa pemilihan Kepala Desa merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan otonomisasi desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 b. bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, tanggal 23 Agustus 2016 yang tidak lagi mensyaratkan domisili bagi calon Kepala Desa serta untuk mengatur penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa, perlu mengubah ketentuan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

 c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai perubahan Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawes Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 155);

 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 162);

 8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 51), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf g dihapus dan diantara huruf g dan huruf h Pasal 20 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g1, sehingga berbunyi :

**Pasal 20**

1. Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa atau bukan Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
2. warga negara Republik Indonesia;
3. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
5. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan/atau pendidikan lain yang sederajat;
6. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
7. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
8. dihapus;

g.1. bersedia tinggal menetap di Desa apabila terpilih;

1. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
3. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. berbadan sehat dan bebas Narkoba; dan
5. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
6. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.
7. Ketentuan huruf b Pasal 23 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 8, dan huruf h dihapus, sehingga berbunyi :

**Pasal 23**

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas :

1. Surat Keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
3. Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
5. Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
6. Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
7. Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
9. Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa; dan
10. Pernyataan bersedia tinggal di Desa apabila terpilih.
11. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
13. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
14. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
15. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD atau Puskesmas setempat;
16. dihapus;
17. fotokopi KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
18. fotokopi KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
19. fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
20. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
21. fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan/atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
22. dokumen berupa :
23. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
24. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten; atau
25. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten di wilayah sekolah tersebut berada.
26. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
27. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
28. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
29. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
30. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
31. Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
32. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, sah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
33. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten bertanggungjawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.
34. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi :

**Pasal 25**

1. Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
2. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, melampirkan izin tertulis dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten atas usulan dari pimpinan instansinya;
3. PNS dari instansi sektoral/vertikal izin dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan di tingkat Kabupaten dan/atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan;atau
4. Anggota TNI/POLRI izin dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
5. Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilampiri Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Sementara.
6. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
7. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi :

**Pasal 26**

1. Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibuat rangkap 2 (dua).
2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan dengan menunjukan asli dari fotokopi persyaratan administratif pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.
3. Calon Kepala Desa yang tidak dapat menunjukan asli dari fotokopi persyaratan administrasi pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau sampai dengan batas waktu berakhirnya pendaftaran Calon Kepala Desa, dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa.
4. Ketentuan ayat (5) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi :

**Pasal 28**

1. Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan/atau di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari.
2. Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 09.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WIB sesuai jam di Sekretariat Panitia Pemilihan.
3. Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26.
4. Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
5. Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditutup dan ternyata :
6. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari;
7. terdapat hanya 1 (satu) orang pendaftar setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan melanjutkan ke penyaringan Bakal Calon; dan
8. tidak ada pendaftar setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
9. Hasil Penjaringan dituangkan dalam Berita Acara.
10. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi :

**Pasal 30**

1. Apabila hasil Penyaringan ternyata hanya 1 (orang) Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, tahapan pencalonan dapat dilanjutkan.
2. Apabila hasil Penyaringan ternyata tidak terdapat Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
3. Panitia Pemilihan melaporkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
4. Ketentuan huruf f ayat (1) Pasal 47 dihapus, dan ditambah satu huruf, yakni huruf i, sehingga berbunyi :

**Pasal 47**

1. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
2. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
3. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
4. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
5. memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
6. menentukan Calon Kepala Desa selain Calon Kepala Desa yang telah ditentukan;
7. dihapus;
8. tidak dicoblos sama sekali;
9. surat suara dicoblos di luar kotak pembatas tanda gambar/foto Calon; dan
10. tanda coblos surat suara lebih dari satu tetapi satu atau lebih tanda coblos berada di dalam dan satu atau lebih tanda coblos lainnya berada di luar kotak pembatas tanda gambar/foto Calon.
11. Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijelaskan kepada Pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
12. Diantara Pasal 51 dan 52 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 51 A dan Pasal 51 B, sehingga berbunyi :

 **Pasal 51 A**

1. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
2. Bupati dapat membentuk Tim untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Keputusan Bupati.
3. Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih, pelantikan calon Kepala Desa terpilih tetap dilaksanakan.

**Pasal 51 B**

Tata cara penyelesaian hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemohon harus calon Kepala Desa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Pemohon mengajukan keberatan hasil pemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati, disertai dengan alasan keberatan dengan melampirkan bukti :
3. Surat Permohonan yang ditandatangani di atas materai 6000;
4. fotokopi KTP yang masih berlaku;
5. fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa;
6. fotokopi Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
7. fotokopi Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
8. bukti tidak dilaksanakannya tahapan pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
9. bukti terjadinya penyimpangan Penetapan Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
10. bukti terjadinya politik uang;
11. bukti terjadinya manipulasi, penyimpangan dan/atau penggelembungan dalam proses pemungutan dan penghitungan surat suara;
12. Surat Pernyataan Saksi dari Pemohon di atas materai 6000 terhadap bukti keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 6 sampai dengan angka 9, disertai fotokopi Saksi yang masih berlaku; dan
13. persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 10 wajib ada, dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 6 sampai dengan angka 9 dapat salah satunya.
14. permohonan keberatan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh BPD;
15. permohonan keberatan hasil pemilihan Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan/atau melampaui waktu pengajuan keberatan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak akan diproses, dan hasil pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah;
16. Bupati melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 A ayat (2), wajib menyelesaikan keberatan hasil pemilihan Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 A ayat (1) setelah permohonan keberatan hasil pemilihan Kepala Desa diterima;
17. dalam hal permohonan keberatan hasil pemilihan Kepala Desa diterima :
18. apabila berdasarkan hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e, bukti keberatan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 terbukti secara sah dan meyakinkan, Bupati menunda pelantikan Kepala Desa terpilih di Desa bersangkutan, dan selanjutnya Bupati menunjuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa untuk memfasilitasi pemilihan ulang Kepala Desa sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
19. apabila berdasarkan hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e bukti keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 7, angka 8, dan angka 9 terbukti secara sah dan meyakinkan, Bupati memerintahkan dengan Surat Perintah kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggugurkan Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. dalam hal permohonan keberatan hasil pemilihan Kepala Desa ditolak, Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk dilantik.
21. Diantara Pasal 52 dan 53 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 52 A, sehingga berbunyi :

**Pasal 52 A**

1. Calon Kepala Desa terpilih tidak dibenarkan mengundurkan diri sejak diterbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sampai dengan dilaksanakannya pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
2. Dalam hal calon Kepala Desa terpilih mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif tidak terjadi pengunduran diri sampai dengan dilaksanakannya pelantikan Kepala Desa.
3. BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian calon Kepala Desa terpilih yang telah mengundurkan diri sebelum dilantik sebagai Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
4. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Bupati menunjuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
6. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawah Desa.
7. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan berdasarkan tata cara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal 26 Juli 2017



Diundangkan di Parigi

pada tanggal 26 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2017 NOMOR 19